

TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DI KOTA BINJAI (Studi pada Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)

ABSTRAK
Nurul Spina *

Dalam praktek, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali terjadi permasalahan antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang dan jasa. Agar prinsip-prinsip dasar *good governance* dapat diimplementasikan dan meminimalisir terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Binjai, dibutuhkan regulasi yang berfungsi mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi lokasi penelitian dalam tesis ini adalah pada Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Binjai. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan pene hukum empiris.

Pengaturan pengadaan barang dan jasa di Kota Binjai dalam percepatan pembangunan antara lain: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintahbeserta perubahannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Melalui Penyedia; Peraturan Walikota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai; Peraturan Walikota Binjai Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa Daerah; Instruksi Walikota Binjai Nomor 000.3.1-200 tentang Percepatan Pengadaan Barang dan jasa Melalui Katalog Elektronik Lokal di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai; Surat Edaran Walikota Binjai Nomor 000.3.1-201. Kedudukan dan Tanggungjawab Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Binjai dalam pengelolaan pengadanan barang dan jasa di Kota Binjai adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang bertugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintahan Daerah yang berbentuk structural yang dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Implementasi peranan pada unit kerj bagian pengadaan barang dan jasa pada Pemerintahan Kota Binjai sudah terlaksana, terlihat dari terlihat dari PAKPA sudah mengoptimalkan SDM masing-masing perangkat pelaksanaan pengadaan, maka pelibatan personel sudah dilakukan sejak tahapan penyusunan perencanaan pengadaan dan penyusunan RKA organisasi perangkat daerah. Dalam hal pengimplementasian kebijakan pengadaan barang dan jasa di Kota Binjai dapat dilihat dalam website lpse.binjaikota.go.id.

Keywords: Tanggungjawab; Pengelolaan, Pengadaan Barang dan jasa, Kota Binjai

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**RESPONSIBILITIES FOR MANAGING PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES TO ACCELERATE DEVELOPMENT IN BINJAI CITY
(Study in the Goods and Services Procurement Unit Work Unit)**

ABSTRACT
Nurul Spina *

In practice, the implementation of government procurement of goods and services often experiences problems, including violations of goods and services procurement procedures. So that the basic principles of good governance can be implemented and minimize the occurrence of problems in the implementation of government procurement of goods and services in Binjai City, regulations are needed that function to regulate the implementation of procurement of these goods and services.

This research is descriptive in nature with a qualitative approach. The research location in this thesis is the Binjai City Goods and Services Procurement Work Unit. The types of legal research used are normative juridical and empirical legal research.

Regulations for the procurement of goods and services in Binjai City to accelerate development include: Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods and Services and its amendments, namely Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021, Regulation of the Government Goods and Services Procurement Policy Institute Number 9 of 2018 concerning Guidelines for Implementing Procurement of Goods and Services Through Providers; Binjai Mayor Regulation Number 4 of 2020 concerning Functions, Duties and Work Procedures of the Binjai City Regional Secretariat; Binjai Mayor Regulation Number 19 of 2022 concerning Code of Ethics for Providing Goods and Services Procurement Services in Regional Goods and Services Procurement Work Units; Instruction of the Mayor of Binjai Number 000.3.1-200 concerning the Acceleration of Procurement of Goods and Services Through Local Electronic Catalogs within the Binjai City Government; Binjai Mayor Circular Number 000.3.1-201. The Position and Responsibilities of the Binjai City Goods and Services Procurement Section Work Unit in managing the procurement of goods and services in Binjai City is a Regional Government work unit tasked with providing support for the procurement of goods and services to the Regional Government in a structural form led by the Head of the Section, who is located below and responsible to the Regional Secretary through the Assistant for Economy and Development. The implementation of the role of the work unit for the procurement of goods and services in the Binjai City Government has been carried out, as can be seen from the fact that PAKPA has optimized the human resources of each procurement implementation tool, so the involvement of personnel has been carried out since the stage of preparing the procurement planning and preparing the RKA of regional apparatus organizations . In terms of implementing policies for the procurement of goods and services in Binjai City, it can be seen on the website lpse.binjaikota.go.id.

Keywords: Responsibility; Management, Procurement of Goods/Services, Binjai City

**Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.*